



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 000.8.2 / 140 /2026
TENTANG

PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN 2026

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, serta hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja oleh Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian yang berbasis pada kinerja dibutuhkan Analisis Jabatan pada setiap Perangkat Daerah untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berdayaguna dan berhasil guna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

✓

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 720);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

✓

- KEDUA : Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, digunakan sebagai pedoman bagi penyusunan kebijakan sebagai pedoman bagi penyusunan kebijakan dibidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah serta sebagai pedoman pokok dalam penyusunan formasi pegawai dan syarat jabatan dalam pengangkatan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan.
- KETIGA : Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, menjadi dasar pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di setiap Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 9 Juni 2026
23 Dzulhijjah 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL,



SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 NOMOR 000.8.2/ 140 /2026
 TENTANG
 PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN
 ANALISIS BEBAN KERJA DILINGKUNGAN
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH
 SINGKIL TAHUN 2026.

REKAPITULASI ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	HASIL ABK	KELEBIHAN/ KEKURANGAN
1	2	3	4	5
1	Sekretaris Daerah	1	1	0
2	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan	1	1	0
3	Staf Ahli Bidang Keistimewaan Aceh, Sumber Daya Manusia dan Kerja Sama	1	1	0
4	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	1	1	0
5	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat	1	1	0
6	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	1	1	0
7	Asisten Administrasi Umum	0	1	-1
8	Kepala Bagian Umum	1	1	0
9	Analisis Kebijakan Ahli Madya	0	1	-1
10	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1	1	0
11	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	0	1	-1
12	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya	0	1	-1
13	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	1	1	0
14	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	0	1	-1
15	Analisis Keuangan Negara Ahli Madya	0	1	-1
16	Analisis Keuangan Negara Ahli Muda	0	1	-1
17	Analisis Keuangan Negara Ahli Pertama	0	1	-1
18	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	0	1	-1
19	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	1	1	0
20	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	0	1	-1
21	Penelaah Teknis Kebijakan	5	6	-1
22	Arsiparis Ahli Muda	0	1	-1
23	Arsiparis Ahli Pertama	1	1	0
24	Penata Layanan Operasional	13	13	0

✓

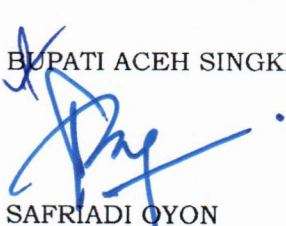
25	Pengelola Layanan Operasional	3	3	0
26	Pengadministrasian Perkantoran	15	17	-2
27	Operator Layanan Operasional	7	7	0
28	Kepala Bagian Organisasi	0	1	-1
29	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	0	3	-3
30	Analisis Kebijakan Ahli Muda	3	3	0
31	Analisis Kebijakan Ahli Madya	0	3	-3
32	Arsiparis Ahli Pertama	0	1	-1
33	Arsiparis Ahli Muda	0	1	-1
34	Arsiparis Ahli Madya	0	1	-1
35	Penelaah Teknis Kebijakan	1	3	-2
36	Penata Layanan Operasional	2	3	-1
37	Pranata Komputer Ahli Pertama	0	3	-3
38	Arsiparis Terampil	0	1	-1
39	Arsiparis Mahir	0	1	-1
40	Arsiparis Penyelia	0	1	-1
41	Pengolah Data Informasi	2	3	-1
42	pengelola Layanan Operasional	0	1	-1
43	Pengadministrasi Perkantoran	1	2	-1
44	Operator layanan operasional	0	1	-1
45	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0	1	0
46	JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	0	2	-2
47	JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	1	2	-1
48	JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	0	2	-2
49	Penelaah Teknis Kebijakan	3	4	-1
50	Pengelola Siaran	0	2	-2
51	Jurnalis	0	2	-2
52	Pengolah Data dan Informasi	0	2	-2
53	Pengadministrasi Perkantoran	2	2	0
54	Penata Layanan Operasional	1	2	-1
55	Pengelola Layanan Operasional	1	2	-1
56	Operator Layanan Operasional	0	3	-3
57	Pengelola Keprotokolan	3	3	0
58	Penata Acara	0	2	-2
59	Kepala Sub Bagian Protokol	1	1	0
60	Penata Keprotokolan	1	2	-1
61	Penelaah Teknis Kebijakan	4	4	0
62	Pengadministrasi Perkantoran	3	5	-2

✓

63	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1	1	0
64	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Muda	3	3	0
65	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama	1	1	0
66	Penelaah Teknis Kebijakan	3	6	-3
67	Pengelola Layanan Pengadaan	1	2	-1
68	Pengelola Layanan Operasional	3	3	0
69	Pengadministrasi Perkantoran	2	2	0
70	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	1	1	0
71	Perencana Ahli Madya	0	1	-1
72	Perencana Ahli Muda	3	3	0
73	Perencana Ahli Pertama	0	3	-3
74	Penelaah Teknis Kebijakan	3	3	0
75	Penata Layanan Operasional	1	1	0
76	Pengelola Layanan Operasional	1	1	0
77	Pengadministrasi Perkantoran	3	5	-2
78	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1	1	0
79	Analisis Kebijakan Ahli Madya	0	1	-1
80	Analisis Kebijakan Ahli Muda	3	3	0
81	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	0	1	-1
82	Penelaah Teknis Kebijakan	1	3	-2
83	Penata Layanan Operasional	2	3	-1
84	Pengembang Kewirausahaan	1	1	0
85	Pengolah Data dan Informasi	0	2	-2
86	Pengelola Layanan Operasional	0	1	-1
87	Pengadministrasi Perkantoran	2	2	0
88	Operator Layanan Operasional	0	1	-1
89	Kepala Bagian Hukum	1	1	0
90	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	0	1	-1
91	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	2	3	-1
92	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya	0	2	-2
93	Analisis Hukum Ahli Pertama	0	1	-1
94	Analisis Hukum Ahli Muda	0	1	-1
95	Analisis Hukum Ahli Madya	0	1	-1
96	Penelaah Teknis Kebijakan	4	4	0
97	Penata Layanan Operasional	4	4	0
98	Pranata Komputer Ahli Madya	0	1	-1
99	Pranata Komputer Ahli Muda	0	1	-1
100	Pranata Komputer Ahli Pertama	1	1	0



101	Arsiparis Ahli Pertama	0	2	-2
102	Arsiparis Ahli Muda	0	2	-2
103	Pengolah Data dan Informasi	0	1	-1
104	Pengadministrasi Perkantoran	0	1	-1
105	Kepala Bagian Pemerintahan	1	1	0
106	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	0	3	-3
107	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1	3	-2
108	Analisis Kebijakan Ahli Madya	0	3	-3
109	Penata Kelola Pemerintahan	0	3	-3
110	Pranata Kewilayahan	0	2	-2
111	Penelaah Teknis Kebijakan	5	7	-2
112	Penata Layanan Operational	3	4	-1
113	Pengolah Data dan Informasi	0	1	-1
114	Pengadministrasian Perkantoran	4	4	0
115	Kepala Bagian Kesra	1	1	0
116	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	0	2	-2
117	Analisis Kebijakan Ahli Muda	2	3	-1
118	Analisis Kebijakan Ahli Madya	0	2	-2
119	Penelaah Teknis Kebijakan	2	2	0
120	Penata Layanan Operasional	1	1	0
121	Pengelola Layanan Operasional	0	1	-1
122	Pengolah data dan informasi	0	1	-1
123	Pengadministrasi Perkantoran	2	3	-1
124	Operator Layanan Operasional	0	1	-1
JUMLAH		153	273	-119

BUPATI ACEH SINGKIL, 6

SAFRIADI OYON

4